|  |
| --- |
| **PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG** |
| Jl. By Pass Km 24 Anak Air, Batipuh Panjang, Koto Tangah  Telp.(0751) 7054806 fax (0751) 40537 |
| Website: *[www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id)* Email: *admin@pta-padang.go.id* |
| **PADANG25171** |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Nomor | : | W3-A/1488.a /OT.01.2/V/2022 | Padang, 24 Mei 2022 |
| Lampiran | : | - |  |
| Hal | : | Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |  |

Yth. Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto

di

Sawahlunto

Assalamualaikum Wr. Wb

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II dimaksudkan untuk:
   1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
   2. Menilai akuntabilitas kinerja instansi.
   3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai mulai dari 0 s.d 100.

Setiap jawaban **“Ya”** akan diberikan nilai **1**, sedangkan jawaban **“Tidak”** akan diberikan nilai **0**, untuk jawaban **a/b/c/d/e,** penilaian didasarkan pada *judgement* evaluator dengan kriteria sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jawaban | Kriteria | Nilai |
| A | Memenuhi hampir semua kriteria  (lebih dari 80% s/d 100%) | 1 |
| B | Memenuhi sebagian besar kriteria  (lebih dari 60% s/d 80%) | 0,75 |
| C | Memenuhi sebagian kriteria  (lebih dari 40% s/d 60%) | 0,50 |
| D | Memenuhi sebagian kecil kriteria  (lebih dari 20% s/d 40%) | 0,25 |
| E | Sangat kurang memenuhi kriteria  (kurang dari atau sama dengan 20%) | 0 |

1. Pengadilan Agama Sawahlunto memperoleh nilai sebesar **84,70% (A)** atau **Memuaskan**.
2. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:
3. **Perencanaan Kinerja** =Bobot 30% nilai yang diperoleh **26,40%:**
4. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) telah ada dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahunan, dan target jangka menengah sudah menetapkan indikator kinerja tujuan.
5. Tujuan dan Sasaran telah berorientasi pada hasil, namun indikator kinerja tujuan (output dan outcome) dan sasaran (output dan outcome) belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik. Tujuan dalam renstra tidak sama dalam renstra antara di satu halaman dengan halaman yang lain.
6. Implementasi Renstra, dokumen Renstra belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan, dan belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran. Dokumen renstra telah di reviu secara berkala.
7. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah ada dan memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, target kinerja tahunan dan menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta selaras dengan Renstra, tetapi belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan untuk menyusun anggaran (RKA). terlihat dari RKT tahun 2021 bertanggal 28 Desember 2020.
8. Dokumen Penetapan Kinerja (PK) telah ada dan telah memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target jangka pendek, namun indikator kinerja sasaran belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
9. **Pengukuran Kinerja** = Bobot 25% nilai yang diperoleh **20,54%:**
10. Terdapat Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran kinerja secara formal.
11. Kualitas pengukuran, IKU belum sepenuhnya dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan realisasinya, dan belum sepenuhnya menggambarkan hasil.
12. Indikator kinerja sasaran pada IKU telah dapat diukur secara objektif, relevan dengan kondisi yang akan diukur serta telah digunakan untuk mengukur kinerja dan realisasinya, namun belum sepenuhnya menggambarkan hasil.
13. Indikator Kinerja Utama IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran serta pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
14. **Pelaporan Kinerja** =Bobot 15% nilai yang diperoleh **13,34%:**
15. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 telah disusun dan disampaikan tepat waktu.
16. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU dan kinerja yang telah diperjanjikan serta perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan. LKjIP telah menjabarkan tentang realisasi keuangan namun belum sepenuhnya menggambarkan capaian kinerjanya.
17. Informasi yang disajikan dalam LKjIP telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, namun belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan, serta belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan dan penilaian kinerja satker.
18. **Evaluasi Internal** = Bobot 10% nilai yang diperoleh **7,75%:**

Monitoring dan Evaluasi sudah dilaksanakan namun hasil pemantauan terhadap kinerja/kegiatan belum sepenuhnya ditindaklanjuti secara periodik dan menyeluruh.

1. **Pencapaian Kinerja** =Bobot 20% nilai yang diperoleh **16,67%:**
2. Penetapan dan capaian target *output/outcome* sebagian besar dapat diandalkan.
3. Informasi kinerja dan keselarasan kinerja secara umum menunjukkan capaian kinerja *output/outcome* masih perlu ditingkatkan.
4. Rekomendasi

Berdasarkan hal diatas direkomendasikan:

1. **Perencanaan Kinerja**
2. Menyempurnakan indikator kinerja tujuan (output/outcome) dan sasaran (output/outcome) pada Renstra sehingga memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik serta diperlukan kehati hatian dan ketelitian dalam penyusunan dokumen renstra sehingga kesalahan penulisan tujuan yang ada dalam renstra antara satu halaman dengan halaman yang lain tidak terjadi.
3. Menyempurnakan dokumen PK sehingga indikator kinerja sasaran memenuhi kriteria inidikator kinerja yang baik dan agar memonitor pencapaianya secara berkala, agar dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan serta agar target kinerja yang dijanjikan digunakan untuk mengukur keberhasilan satker.
4. **Pengukuran Kinerja**
5. Meningkatkan kualitas pengukuran dan indikator kinerja sasaran pada IKU sebagai ukuran kinerja secara formal
6. Indikator Kinerja Utama agar dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran serta dipergunakan sebagai pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
7. **Pelaporan Kinerja**
8. Agar lebih menyempurnakan informasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan menambah dayaguna LKjIP sebagai sumber informasi dalam upaya perbaikan pelaksanaan program, perbaikan perencanaan, peningkatan kinerja, penilaian kinerja satker dan pencapaian kinerja periode selanjutnya.
9. LKjIP juga bisa menjelaskan keberhasilan capaian kinerja yang diraih pada Renstra sebelumnya sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan di tahun tahun berikutnya.
10. Agar informasi keuangan dalam LKjIP tidak hanya menyajikan realisasi anggarannya tetapi juga menyajikan penjelasan yang memadai dan perbandingan pencapaian yang diperlukan terkait dengan kinerja keuangannya.
11. **Evaluasi Internal**

Agar dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Perjanjian Kinerja, dan hasil dari monitoring dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

1. **Pencapaian Kinerja**

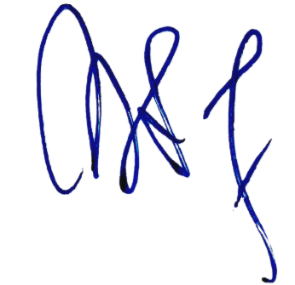
Agar meningkatkan capaian kinerja outcome sehingga capaian kinerjanya lebih lebih baik dari tahun sebelumnya serta meningkatkan keandalan informasi mengenai kinerja outcome.

Demikian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Sawahlunto tahun 2021, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja dilingkungan Pengadilan Agama Sawahlunto.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Drs. H. Zein Ahsan, M.H

NIP. 195508261982031004

Tembusan YTH:

1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi c.q. Biro Perencanaan dan Organisasi